



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
(DPA - OPD)**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**Urusan Pemerintahan : 5.01 Perencanaan**  
**Organisasi : 3.00.01.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah**

**PENGGUNA ANGGARAN :**

**NAMA : Ir. A. Darmawan Bintang, MDevPlg**  
**NIP : 196704271993031015**  
**JABATAN : Kepala BAPPELITBANGDA Prov. Sulsel**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Urip Sumohardjo Nomor 269 Telepon (0411) 453050  
MAKASSAR 90231

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 46 / I / TAHUN 2022  
TENTANG

PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanah Pasal 24 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan persetujuan Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

- 110, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4614);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 7);
  32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 250);
  33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
  34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296);

35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 273);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 278);
37. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 295);
39. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 13);
40. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 150 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang



bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 150 Tahun 2018);

41. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Personil Lainnya Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 27);
42. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 24);
43. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kapitalisasi dan Penyusutan Asset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 46);
44. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 53);
45. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tanggal 4 November 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara;
  2. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 6/I/Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran sebagai Pejabat yang diberi Wewenang menandatangani SPM, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan SPJ, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 7/1/Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani SPM, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan SPJ, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**KESATU** : Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 1. URUSAN          | : | PERENCANAAN  |
| 2. ORGANISASI      | : | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN |
| 3. PENDAPATAN      | : | Rp. 52.880.000,00  |
| 4. BELANJA :       |   |  |
| a. Belanja Operasi | : | Rp. 59.986.828.378,00  |
| b. Belanja Modal   | : | Rp. 849.047.400,00   |
|                    |   | -----  |
| Jumlah             | : | Rp. 60.835.875.778,00  |

**KEDUA** : Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan kegiatan pada Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 sah, apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**KETIGA** : Pelaksanaan kegiatan mempedomani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Disahkan di Makassar

Pada tanggal 03 Januari 2022

an.GUBERNUR SULAWESI SELATAN

SEKRETARIS DAERAH,



Dr. ABDUL HAYAT, M.Si

Pangkat Pembina Utama

NIP:19650405 199010 1 002

Tembusan :

1. Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan sebagai laporan;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan.



PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERSETUJUAN REKAPITULASI  
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

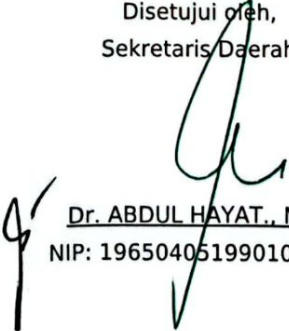
- a. Nama : Ir. A. Darmawan Bintang, MdevPlg  
b. NIP : 196704271993031015  
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2022.

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD	Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD


Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,  
Sekretaris Daerah

  
Dr. ABDUL HAYAT., M.Si  
NIP: 196504051990101002

Makassar, tanggal 03 Januari 2022

Disahkan oleh,  
PPKD

  
Drs. Muhammad Rasyid  
NIP: 196412311992031123



PROVINSI SULAWESI SELATAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN 2022

URUSAN PEMERINTAHAN : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  
BIDANG URUSAN : 5.01 PERENCANAAN  
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
ORGANISASI : 5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pengguna Anggaran :  
a. Nama : Ir. A. Darmawan Bintang, MdevPlg  
b. NIP : 196704271993031015  
c. Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

Disahkan oleh,  
PPKD

Drs. Muhammad Rasyid  
NIP: 196412311992031123

Makassar, tanggal 03 Januari 2022  
Pengguna Anggaran

Ir. A. Darmawan Bintang, MdevPlg  
NIP: 196704271993031015

<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>DPA REKAPITULASI SKPD</b>
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022	
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.51.0000/001/2022	
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Satuan Kerja Perangkat Daerah

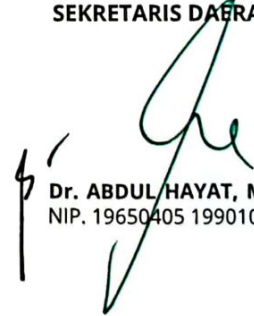
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4 1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Rp52.880.000</b>
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp26.960.000
4 1 04	Lain-lain PAD yang Sah	Rp25.920.000
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Rp52.880.000</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	
<b>5 1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp59.986.828.378</b>
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp26.864.996.605
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp33.121.831.773
<b>5 2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp849.047.400</b>
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp749.047.400
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp100.000.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp60.835.875.778</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(Rp60.782.995.778)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp0</b>
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp0</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>Rp0</b>

Rencana Realisasi Penerimaan per Bulan		Rencana Penarikan Dana per Bulan	
Januari	Rp4.406.666	Januari	Rp14.014.738.916
Februari	Rp4.406.666	Februari	Rp0
Maret	Rp4.406.666	Maret	Rp0
April	Rp4.406.666	April	Rp17.019.216.290
Mei	Rp4.406.666	Mei	Rp1.320.000
Juni	Rp4.406.666	Juni	Rp0
Juli	Rp4.406.666	Juli	Rp14.623.473.335
Agustus	Rp4.406.666	Agustus	Rp0
September	Rp4.406.666	September	Rp0
Oktober	Rp4.406.666	Oktober	Rp15.174.364.737
November	Rp4.406.666	November	Rp2.762.500
Desember	Rp4.406.674	Desember	Rp0
Jumlah	Rp52.880.000	Jumlah	Rp60.835.875.778

Makassar, tanggal 03 Januari 2022



Menyetujui,

**SEKRETARIS DAERAH**

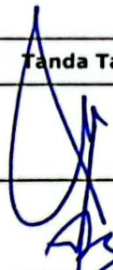



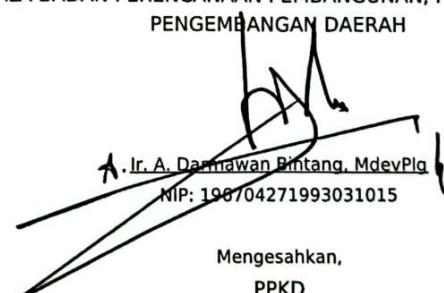

Dr. ABDUL HAYAT, M.Si  
NIP. 19650405 199010 1 002

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. A. DARMAWAN BINTANG, M.dev. Plg	196704271993031015	Kepala Bappelitbangda	
2.	Drs. H. MUHAMMAD RASYID	196412311992031123	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	


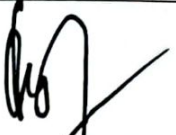
**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
3	ASRUL SANI, SH. M.Si	197503212003121008	Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/jasa	
4	Hj. ANDI MIRNA, SH	196710061993012002	Kepala Biro Organisasi	

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-PENDAPATAN SKPD			
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022					
<b>Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.51.0000/001/2022</b>					
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uralan	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Tarif/Harga	(Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH				Rp52.880.000
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				Rp52.880.000
4.1.02	Retribusi Daerah				Rp26.960.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha				Rp26.960.000
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakalan Kekayaan Daerah				Rp26.960.000
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				Rp26.960.000
	:: Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan				
	::: kantin				
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp12.960.000	Rp12.960.000
	::: Sewa Kamar Mess dan Aula (Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan KUPA)				
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1 Tahun	Tahun	Rp14.000.000	Rp14.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah				Rp25.920.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan				Rp25.920.000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD				Rp25.920.000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD				Rp25.920.000
	:: Hasil Sewa BMD				
	::: Kantin				
	Hasil Sewa BMD	1 Tahun	Tahun	Rp25.920.000	Rp25.920.000
	<b>Jumlah</b>				<b>Rp52.880.000</b>
<b>Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan</b>					
Januari	Rp4.406.666				
Februari	Rp4.406.666				
Maret	Rp4.406.666				
April	Rp4.406.666				
Mei	Rp4.406.666				
Juni	Rp4.406.666				
Juli	Rp4.406.666				
Agustus	Rp4.406.666				
September	Rp4.406.666				
Oktober	Rp4.406.666				
November	Rp4.406.666				
Desember	Rp4.406.674				
Jumlah	Rp52.880.000				
		<p>Makassar, tanggal 03 Januari 2022</p> <p>KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</p> <p></p> <p>A. Ir. A. Darmawan Bintang, MdevPlg NIP: 198704271993031015</p> <p>Mengesahkan, PPKD</p> <p></p> <p>Drs. Muhammad Rasyid NIP: 196412311992031123</p>			



**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No	Nama	NIP	Jabatan	Tandan Tangan
1	Drs. H. Muhammad Rasyid	19641231 199203 2 123	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
2	H. Sumardi, S.Sos, M.Si	19680821 199103 1 030	Kepala Badan Pendapatan Daerah	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir  
DPA-BELANJA  
SKPD**

Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun Anggaran 2022

**Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.51.0000/001/2022**

Organisasi : 5.01.5.05.0.00.51.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Belanja Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>									
5	01				<b>PERENCANAAN</b>				<b>50.922.114.638</b>	<b>849.047.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.771.162.038</b>	
5	01	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				<b>33.071.268.846</b>	<b>769.117.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.840.386.246</b>	
5	01	01	1.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>630.576.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630.576.700</b>	
5	01	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		77.681.000	0	0	0	77.681.000	
5	01	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		106.332.400	0	0	0	106.332.400	
5	01	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		446.563.300	0	0	0	446.563.300	
5	01	01	1.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>27.284.249.005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.284.249.005</b>	
5	01	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		26.864.996.605	0	0	0	26.864.996.605	
5	01	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		319.724.400	0	0	0	319.724.400	
5	01	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		99.528.000	0	0	0	99.528.000	
5	01	01	1.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				<b>73.837.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.837.500</b>	
5	01	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		15.775.500	0	0	0	15.775.500	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		58.062.000	0	0	0	58.062.000	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>301.665.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.665.600</b>	
5	01	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		78.497.500	0	0	0	78.497.500	
5	01	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		67.617.300	0	0	0	67.617.300	
5	01	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		155.550.800	0	0	0	155.550.800	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>1.356.556.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.356.556.800</b>	
5	01	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		144.998.500	0	0	0	144.998.500	
5	01	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		135.561.000	0	0	0	135.561.000	
5	01	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		79.853.500	0	0	0	79.853.500	
5	01	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		200.703.800	0	0	0	200.703.800	
5	01	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		795.440.000	0	0	0	795.440.000	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				<b>10.780.000</b>	<b>769.117.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779.897.400</b>	
5	01	01	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4.040.000	100.000.000	0	0	104.040.000	
5	01	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		6.740.000	669.117.400	0	0	675.857.400	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>1.013.366.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.013.366.100</b>	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		168.044.100	0	0	0	168.044.100	
5	01	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		845.322.000	0	0	0	845.322.000	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>1.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2.400.237.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400.237.141</b>	
5	01	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		577.330.000	0	0	0	577.330.000	
5	01	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		454.446.560	0	0	0	454.446.560	
5	01	01	1.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		103.964.500	0	0	0	103.964.500	
5	01	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		544.836.560	0	0	0	544.836.560	
5	01	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan; Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		719.659.521	0	0	0	719.659.521	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>12.188.621.292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.188.621.292</b>	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>1.01</b>		<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>				<b>2.841.044.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.841.044.500</b>	
5	01	02	1.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		319.058.000	0	0	0	319.058.000	
5	01	02	1.01	06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.521.986.500	0	0	0	2.521.986.500	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	02	1.02		<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>201.454.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.454.800</b>	
5	01	02	1.02	01	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		201.454.800	0	0	0	201.454.800	
5	01	02	1.03		<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>				<b>9.146.121.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.146.121.992</b>	
5	01	02	1.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		8.191.426.692	0	0	0	8.191.426.692	
5	01	02	1.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		624.870.500	0	0	0	624.870.500	
5	01	02	1.03	04	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		329.824.800	0	0	0	329.824.800	
5	01	03			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>				<b>5.662.224.500</b>	<b>79.930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.742.154.500</b>	
5	01	03	1.01		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>				<b>1.284.252.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.284.252.400</b>	
5	01	03	1.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		136.571.300	0	0	0	136.571.300	
5	01	03	1.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		181.940.100	0	0	0	181.940.100	
5	01	03	1.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		271.700.000	0	0	0	271.700.000	
5	01	03	1.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		287.969.000	0	0	0	287.969.000	
5	01	03	1.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		231.852.000	0	0	0	231.852.000	
5	01	03	1.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		174.220.000	0	0	0	174.220.000	
5	01	03	1.02		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>				<b>1.233.287.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.233.287.800</b>	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	01	03	1.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		163.926.900	0	0	0	163.926.900	
5	01	03	1.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		156.263.000	0	0	0	156.263.000	
5	01	03	1.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		282.405.900	0	0	0	282.405.900	
5	01	03	1.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		164.781.200	0	0	0	164.781.200	
5	01	03	1.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		159.162.900	0	0	0	159.162.900	
5	01	03	1.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		306.747.900	0	0	0	306.747.900	
<b>5</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>1.03</b>		<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>				<b>3.144.684.300</b>	<b>79.930.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.224.614.300</b>	
5	01	03	1.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		209.568.700	0	0	0	209.568.700	
5	01	03	1.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		155.620.900	0	0	0	155.620.900	
5	01	03	1.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.157.713.000	79.930.000	0	0	2.237.643.000	
5	01	03	1.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		206.402.800	0	0	0	206.402.800	
5	01	03	1.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		134.000.000	0	0	0	134.000.000	
5	01	03	1.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		281.378.900	0	0	0	281.378.900	
<b>5</b>	<b>05</b>				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				<b>9.064.713.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.064.713.740</b>	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T				T+1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	05	02			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>				<b>9.064.713.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.064.713.740</b>	
5	05	02	1.01		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>				<b>852.776.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852.776.500</b>	
5	05	02	1.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		611.367.200	0	0	0	611.367.200	
5	05	02	1.01	14	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		241.409.300	0	0	0	241.409.300	
5	05	02	1.02		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>				<b>2.876.991.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.876.991.800</b>	
5	05	02	1.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		412.986.300	0	0	0	412.986.300	
5	05	02	1.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2.202.638.200	0	0	0	2.202.638.200	
5	05	02	1.02	06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		261.367.300	0	0	0	261.367.300	
5	05	02	1.03		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>				<b>3.823.870.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.823.870.540</b>	
5	05	02	1.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		546.654.500	0	0	0	546.654.500	
5	05	02	1.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.129.001.000	0	0	0	1.129.001.000	
5	05	02	1.03	05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan		Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		198.215.040	0	0	0	198.215.040	
5	05	02	1.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Barru, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1.950.000.000	0	0	0	1.950.000.000	
5	05	02	1.04		<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>				<b>1.511.074.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.511.074.900</b>	
5	05	02	1.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		561.000.000	0	0	0	561.000.000	

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah					T+1	
Uraian	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T					Jumlah
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15
5	05	02	1.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		40.000.000	0	0	0	40.000.000	
5	05	02	1.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		403.215.400	0	0	0	403.215.400	
5	05	02	1.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		156.032.500	0	0	0	156.032.500	
5	05	02	1.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		350.827.000	0	0	0	350.827.000	

**Rencana Penarikan Dana per Bulan**

Januari	Rp14.014.738.916
Februari	Rp0
Maret	Rp0
April	Rp17.019.216.290
Mei	Rp1.320.000
Juni	Rp0
Juli	Rp14.623.473.335
Agustus	Rp0
September	Rp0
Oktober	Rp15.174.364.737
November	Rp2.762.500
Desember	Rp0
<b>Jumlah</b>	<b>Rp60.835.875.778</b>

Makassar, tanggal 03 Januari 2022  
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

*(Signature)*  
Ir. A. Darmawan Bintang, MdevPlg  
 NIP: 196704271993031015

Mengesahkan,  
 PPKD

*(Signature)*  
Drs. Muhammad Rasyid  
 NIP: 196412311992031123

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
-----	------	-----	---------	--------------